

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN PADA PROGRAM PNPM**

***ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN ROAD INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN PNPM PROGRAM***

Herma Yunita¹, Swi Yanti²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Prana Putra^{1,2}

hermayunita@stiebi pranaputra.ac.id¹

ABSTRACT

Urban development from the past until now has always been an interesting theme discussed in development discussions, this is because the development of rural / urban villages is an integral as well as a central point of national development. The purpose of this study was to determine community participation in the development of road infrastructure through the PNPM Program in Kelurahan Ponorogo, Lubuklinggau Utara District II. This research is a survey research. The type of data used is primary data obtained from questionnaires, interviews, observations, documentation with the number of respondents 7 neighborhood units (RT) where to be taken are 2 KSM (self-help groups) in 2 RTs in Ponorogo Kelurahan, namely RT 1 and RT 2. The total population of the two Rt is 178 households. The sampling method used was purposive sampling by 50%, so the number of samples to be taken was as many as 89 people. Data analysis methods used are descriptive analysis and qualitative analysis. The results of this study indicate that (1) Participation of the community in the form of mind Ponorogo Village has been going very well, with a percentage of 86.6%. (2) The participation of workers by the community in the construction of road infrastructure is 77.5% with a good category. (3) Community participation in the form of expertise is 55.1% with a fairly good category, (4) Community participation in the form of goods is carried out voluntarily by 100% with a very good category (5) Participation in community money Ponorogo Kelurahan is basically non-existent, however more manifested in the form of consumption, such as providing coffee water, tea water and snacks during mutual assistance in the construction of infrastructure roads through the PNPM Program.

Keywords: *Community Participation, Road Infrastructure Development, PNPM, Village Ponorogo*

ABSTRAK

Pembangunan perkotaan dari dulu hingga sekarang selalu menjadi tema yang menarik diperbincangkan dalam diskusi pembangunan, hal ini dikarenakan pembangunan pekelurahan/kelurahan merupakan bagian integral sekaligus titik sentral dari pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui Program PNPM di Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Penelitian ini merupakan penelitian survey. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi dengan jumlah responden 7

rukun tetangga (RT) dimana yang akan diambil adalah 2 KSM (kelompok swadaya masyarakat) di 2 RT Kelurahan Ponorogo, yakni RT 1 dan RT 2. Jumlah penduduk kedua Rt tersebut adalah 178 kepala keluarga. Metode pengambilan sampel digunakan adalah *purposive sampling* sebesar 50%, jadi jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 89 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat Kelurahan Ponorogo dalam bentuk pikiran telah berjalan sangat baik, dengan persentase sebesar 86,6%. (2) Partisipasi tenaga oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan sebesar 77,5% dengan kategori baik. (3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian sebesar 55,1% dengan kategori cukup baik, (4) Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang dilakukan secara sukarela sebesar 100% dengan kategori sangat baik (5) Partisipasi uang masyarakat Kelurahan Ponorogo pada dasarnya tidak ada, namun lebih diwujudkan dalam bentuk konsumsi, seperti menyediakan air kopi, air teh dan penganan selama kegiatan gotong royong pembangunan jalan infrastruktur melalui Program PNPM.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Jalan, PNPM, Kelurahan Ponorogo

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan (Effendi, 2002). Pembangunan juga memiliki makna suatu “proses” menggambarkan adanya pengembangan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya (Mustanir & Darmiah, 2016). Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (*society*). Kesuksesan pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh perencanaan yang baik, dimana pemerintah senantiasa mendengar, memperhatikan dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat (*stakeholder*) dalam menetapkan kebutuhan pembangunan dan tidak hanya melakukan proses perencanaan secara *top down planning* yang kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Pembangunan perkotaan dari dulu hingga sekarang selalu menjadi

tema yang menarik diperbincangkan dalam diskusi pembangunan, hal ini dikarenakan pembangunan pekelurahan/kelurahan merupakan bagian integral sekaligus titik sentral dari pembangunan nasional. Pembangunan di perkotaan maupun perdesaan dapat dikatakan sukses dilihat dari sejauhmana perencanaan pembangunan tersebut mampu mengundang partisipasi masyarakat ditempat tersebut (Fadli, 2012) demikian juga dengan tujuan pembangunan perkotaan/kelurahan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kelurahan. Pembangunan daerah merupakan suatu bagian integral dari Pembangunan Nasional yang mempunyai arti yang strategis di suatu daerah. Berhasilnya pembangunan suatu daerah akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual. Sehingga tujuan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat memberikan hasil nyata, dalam arti

adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu pihak dan di pihak lain munculnya semangat atau gairah membangun dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat pada suatu daerah tersebut.

Pembangunan pada suatu daerah tentunya tidak akan terlepas dari terlibatnya masyarakat dan *stakeholders* yang ada. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan di perkotaan dapat menjadi faktor keberhasilan program tersebut. Partisipasi ini akan terwujud dalam kegiatan nyata apabila ada kemampuan, kemauan dan kesempatan. Todaro (2014) mengatakan bahwa kemampuan dan kemauan masyarakat dalam berpartisipasi dalam sebuah program tertentu berasal dari dalam diri masyarakat sendiri, artinya meskipun ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk membangun infrastruktur tetapi jika tidak ada kemampuan dan kemauan dari masyarakat maka partisipasi tidak akan terwujud. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Adisasmita (2006) menyatakan bahwa, "Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan". Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi perlu disadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom-up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral

pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan kelurahan tertinggal. PNPM Mandiri Perkotaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perkotaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin Perkotaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perkotaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perkotaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perkotaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar kelurahan. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perkotaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pada PNPM Mandiri Perkotaan seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahap kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan prioritas di kelurahan masing-masing hingga pelaksanaan dan pemeliharannya.

Tahun 2008 pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan di beberapa wilayah kelurahan dan kecamatan, salah satunya adalah Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau. Kelurahan Ponorogo memiliki 7 Rukun Warga, dengan jumlah penduduk sebanyak 763 penduduk. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 10 warga yang dengan menanyakan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Ponorogo, dapat diketahui bahwa program Mandiri Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

telah masuk di Kelurahan Kelurahan Ponorogo sejak tahun 2008 dan selesai pembangunan ditahun 2010. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tentunya menjadi harapan yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam hal pembangunan jalan kecil (jalan setapak). Jalan setapak yang belum dibangun tersebut masih berupa tanah sehingga ketika musim hujan akan menyulitkan warga dalam berkegiatan dan tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat itu sendiri.

Adapun pelaksanaan pembangunan jalan setapak tersebut dilakukan pada tahun 2010 selama kurun waktu 8 (delapan) bulan terselesaikan, berdasarkan wawancara dengan beberapa warga dinyatakan bahwa masyarakat kurang mampu menjaga infrastruktur jalan yang ada di lingkungan kelurahan ponorogo, seperti dapat diketahui bahwa seharusnya jalan setapak tersebut digunakan selama kurun waktu kurang dari 10 tahun, tetapi disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan masyarakat kurang memelihara jalan setapak sehingga dalam waktu kurang dari 3 tahun, jalan setapak sepanjang ± 200 m rusak dan berlubang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur jalan sehingga tersebut rusak, dikarenakan dalam pembangunan masyarakat kurang ikut berpartisipasi terhadap perencanaan baik mengenai sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga ataupun dana untuk bukti partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat belum memiliki rasa memiliki atas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kelurahan Ponorogo. Berdasarkan wawancara dengan sebagian masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Ponorogo mala dapat dianalisa terdapat beberapa

fenomena permasalahan dilingkungan Kelurahan Ponorogo mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keberhasilan sebuah kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat akan ditentukan oleh komunikasi yang partisipatif. Adanya komunikasi yang partisipatif memungkinkan anggota komunitas penerima program (partisipan) memiliki rasa tanggung jawab untuk keberlanjutan memberdayakan diri dan masyarakatnya serta dapat menggali potensi dan kreativitas masyarakat (Suparjan *et al.* 2003). Dengan komunikasi partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali. Pendeknya, dengan pendekatan partisipatif diharapkan dapat berkembangnya aktifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial sebagai anggota komunitas itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, maka keterampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka atau partisipan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan melakukan penelaahan dan penganalisisan masalah sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil jalan kelurahan yang rusak di lokasi

penelitian. Tehnik pengumpulan data yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Pengamatan (observasi) , (2) Dokumentasi, (3) Kuisisioner, (4) Wawancara

Jumlah responden/populasi penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklingau Utara II Kota Lubuklinggau yang tersebar di 7 rukun tetangga (RT). Dalam penelitian ini, akan diambil 2 KSM (kelompok swadaya masyarakat) di 2 RT Kelurahan Ponorogo, yakni RT 1 dan RT 2. Jumlah penduduk kedua Rt tersebut adalah 178 kepala keluarga. Metode pengambilan sampel digunakan adalah purposivesampling sebesar 50%, jadi jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 89 orang. Ke- 89 orang tersebut akan digunakan sebagai responden pengisi kuesioner.

Untuk menunjang hasil kuesioner, akan dilakukan wawancara dengan 4 orang (2 orang tiap-tiap KSM) berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini berupa eksplorasi lapangan yang diketahui bahwa secara umum masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau sangat senang dengan kehadiran program PNPM di daerahnya. Masyarakat bersyukur program PNPM ini mampu memenuhi harapan masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau yang dari dulu menginginkan dibangunnya jalan di wilayahnya. Berbagai usulan telah dilakukan oleh warga masyarakat kepada

dinas/instansi terkait, namun sejauh ini belum ada realisasi. Kehadiran program PNPM tersebut tentu saja disambut dengan gembira oleh warga.

Kegembiraan masyarakat ini ditunjukkan dari partisipasi masyarakat secara umum dalam program pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan baik adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ponorogo adalah sebagai berikut :

Partisipasi Pikiran

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya, disamping merangkul

keikutsertaan masyarakat di Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau itu sendiri, utamanya dalam partisipasi pikiran yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan, maupun bagi masyarakat itu sendiri. Berikut tabel hasil partisipasi pikjian dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. Tabel 1 menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk pikiran pada masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sebesar 86,5% atau berada pada kategori sangat baik

Tabel 1 Partisipasi Pikiran Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

No	Keterlibatan		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Bersedia memberikan sumbangan ide/gagasan dalam program pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Anda	Ya	77	86,5
		Tidak	12	13,5
Jumlah			89	100

Sumber : Data Olahan (2020)

Partisipasi Tenaga

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, partisipasi tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat kelurahan yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan kelurahan, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik PNPM-MP.

Tabel 2 menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk tenaga pada masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sebesar 77,5% atau berada pada kategori baik.

Tabel 2 Partisipasi Tenaga oleh Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

No	Keterlibatan		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Bersedia memberikan sumbangan tenaga dalam program pembangunan infrastruktur	Ya	69	77,5

jalan di lingkungan Anda	Tidak	20	22,5
Jumlah		89	100

Sumber : Data Olahan (2020)

Partisipasi Keahlian

Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Tabel 3

menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk keahlian pada masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sebesar 55,1% atau berada pada kategori cukup baik.

Tabel 3 Partisipasi Keahlian oleh Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

No	Keterlibatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	
1	Bersedia memberikan sumbangan keahlian dalam program pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Anda	Ya	49	55,1
		Tidak	40	44,9
Jumlah		89	100	

Sumber : Data Olahan (2020)

Partisipasi Barang

Barang yang dimaksudkan adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga kelurahan yang secara sukarela disumbangkan kepada kelurahan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa partisipasi

barang oleh masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan berada pada kategori sangat baik, yakni sebesar 100% masyarakat terlihat dalam pembangunan jalan tersebut.

Tabel 4 Partisipasi Barang oleh Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

No	Keterlibatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	
1	Bersedia memberikan sumbangan barang dalam program pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Anda	Ya	89	100
		Tidak	-	-
Jumlah		89	100	

Sumber : Data Olahan (2020)

Partisipasi Uang

Partisipasi uang adalah bentuk swadaya masyarakat dalam bentuk *finansial* (uang) yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan jalan. Diinformasikan oleh semua informan bahwa tidak terdapat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam bentuk uang karena program PNPM-MP ini

telah memiliki anggaran dana yang cukup yang dikelola dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatannya dan juga berkat bantuan atau dalam artian partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangsi tenaga dan keahlian yang jika menggunakan pekerja sewa akan memakan biaya, sehingga dana yang di anggarkan

Tabel 5 Partisipasi Uang oleh Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

No	Keterlibatan		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Bersedia memberikan sumbangan uang dalam program pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Anda	Ya	-	-
		Tidak	89	100
Jumlah			89	100

Sumber : Data Olahan (2020)

Jadi tingkat keberhasilan PNPM-MP di Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik dilihat dari hasil partisipasi masyarakatnya yakni :(1) Partisipasi dalam bentuk pikiran telah berjalan sangat baik, dengan persentase sebesar 86,6%. (2) Partisipasi tenaga oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan sebesar 77,5% dengan kategori baik. (3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian sebesar 55,1% dengan kategori cukup baik, (4) Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang dilakukan secara sukarela sebesar 100% dengan kategori sangat baik (5) Partisipasi uang masyarakat Kelurahan Ponorogo pada dasarnya tidak ada, namun lebih diwujudkan dalam bentuk konsumsi, seperti menyediakan air kopi,

air teh dan penganan selama kegiatan gotong royong pembangunan jalan infrastruktur melalui Program PNPM.

Masyarakat sangat berharap agar program PNPM selanjutnya ditingkatkan terutama untuk menjangkau kawasan-kawasan yang tidak diagendakan dalam program pembangunan daerah, seperti halnya untuk lorong-lorong kecil, jalan produksi dan sebagainya. Peningkatan tersebut juga menyangkut frekuensi dan jumlah dana yang dianggarkan, sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat terwujud.

Selanjutnya, juga diketahui bahwa infrastruktur jalan yang telah dibangun bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau pada saat ini sudah rusak. Hal ini dikarenakan pada saat

pembangunan, pelaksanaan dikerjakan secara bergotong-royong (bersama-sama) sehingga kualitas hasil relatif tidak diperhatikan, yang terpenting pekerjaan jalan sudah selesai dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa orang informan penelitian di antaranya adalah lurah, anggota KSM, dan fasilitator PNPM (Adisasmita 2006).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni : (1) Partisipasi masyarakat Kelurahan Ponorogo dalam bentuk pikiran telah berjalan sangat baik, (2) Partisipasi tenaga oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan sebesar dengan kategori baik. (3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian dengan kategori cukup baik, (4) Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang dilakukan secara sukarela dengan kategori sangat baik.

Saran

Partisipasi uang masyarakat Kelurahan Ponorogo pada dasarnya tidak ada, namun lebih diwujudkan dalam bentuk konsumsi, seperti menyediakan air kopi, air teh dan penganan selama kegiatan gotong royong pembangunan jalan infrastruktur melalui Program PNPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- BPS. (2013). *Kota Lubuklinggau dalam Angka Tahun 2011/2012*, Kota Lubuklinggau: Biro Pusat Statistik.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238.
- Effendi, B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Fadli, M. (2012). *Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Jurnal)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008
- Suparjan & Hempri, S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Todaro, P., M. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga.